

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dipandang perlu menetapkan kembali Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan LKPP.

KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan;
- d. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- e. Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
- f. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

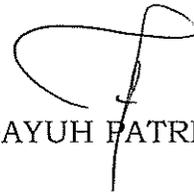
KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM  
DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT  
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 5 TAHUN 2015  
TANGGAL : 5 Februari 2015

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA  
SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Anita Carollin, S.Sos NIP. 19810928 201012 2 001 Pengolah Data Tata laksana	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Rita Agustini Sumardi, A.Md NIP. 19780813 201012 2 001 Penelaah Bahan Tata Usaha	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan
3.	Ratna Ayu Maruti, S.I.P NIP. 19870325 201012 2 001 Calon Pranata Hubungan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Desi Kartika, S.H. NIP. 19891212 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Mita Astarti Yatnanti, S.E. NIP. 19850924 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
8.	Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Linggar Lailatussa'adah Inhardy, S.T NIP. 19881002 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Anatasia, S.Psi NIP. 19881217 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Agung Widayat, S.T. NIP. 19760430 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Lintong Janji Natogu Sinambela, S.E. NIP. 19820424 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14.	Mirna Medita Endikasari, S.E. NIP. 19860112 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Ade Rizky Emirsyah, S.T. NIP. 19840509 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,

  
IKAK GAYUH PATRIASTOMO